

**KEPENTINGAN INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN JEPANG
DALAM BIDANG PERTAHANAN MILITER DALAM PERJANJIAN 2+2
(ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN)**

Oleh: Rizqa Deni Fathanah

email: Rizqadf04@gmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.Ip., M.Si

Bibliografi: 16 Buku, 10 Dokumen, 29 Jurnal, 33 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's interests in carrying out defense cooperation with Japan on the 2+2 nomenclature. This defense cooperation involves two ministries from each country; the Ministry of Defense and Ministry of Foreign Affairs. Furthermore, the collaboration began in 2015 and will continue in 2021.

To maintain the analytical framework, this study uses a qualitative methodology supported by interviews with structural experts and related officials, document analysis, literature studies, and policy observations. The aspect of International Relations in this research lies in the use of Neorealism and Defense Diplomacy perspectives as a theoretical framework. The correlation between the two leads to the results of academic observations in this study.

This research found rational reasons for why the collaboration occurred, the reasons for its urgency, and its relevance. Broadly speaking, this study found the driving factors for cooperation between Indonesia and Japan in 2+2 due to the similarity of challenges and threats between Japan in East Asia and Indonesia in Southeast Asia. In addition, inter- and intra-regional complexity is one of the cornerstones of the analysis.

Keywords: *Indonesia and Japan 2+2 defense cooperation, Indonesian defense diplomacy, dynamics of the strategic environment.*

PENDAHULUAN

Dalam konstestasi perpolitikan internasional, negara-negara memiliki otoritasnya sendiri. Dengan begitu, menjadikan keadaan internasional yang anarkis atau kondisi ketika semua subjek memiliki otoritasnya sendiri—tidak ada negara di atas negara. Dikarenakan kondisi yang anarkis dan semua negara saling memiliki otoritasnya tersendiri, maka kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik antar negara.¹

Seiring dengan perkembangan perpolitikan dunia, setiap negara memiliki kecenderungan untuk berlaku damai dan di saat bersamaan pula ingin mendominasi. Sikap politik negara yang ingin berlaku damai dan di saat bersamaan pula ingin mendominasi (atau sebatas untuk menghalau ancaman negara) tersebut yang membentuk pola-pola kerjasama bilateral atau pun multilateral memiliki variannya, salah satunya adalah kerjasama di bidang militer. Tentu, kondisi ini memiliki jejak historis yang dapat dibatasi pada masa akhir Perang Dingin.

. Kerjasama bidang militer juga dapat dilihat sebagai suatu representasi dari kepentingan negara atau bagaimana sebuah negara membentuk sikap politik di dalam kancah internasional.²

Salah satu kerjasama di bidang militer tersebut dapat dilihat pada kerjasama militer antara Indonesia dan Jepang. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang memiliki poin spesifik tersendiri. Bagi Indonesia, Jepang pada masa sekarang ini merupakan mitra strategis dalam banyak hal, seperti mitra intelijen, pelatihan teknis, pendidikan dan

pelatihan, juga mitra dalam kerjasama bidang perekonomian.

Hubungan bilatera antara Indonesia dan Jepang yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 tersebut berlanjut pada pertemuan yang dilakukan di Jepang tahun 2021. Kerjasama militer kedua negara ini berisikan berbagai hal dengan mayoritas pembahasan bidang militer dan pertahanan. Pertemuan 2+2 tersebut diakhiri dengan tandatangan kerjasama yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara. Penandatanganan kerjasama tersebut meliputi usaha untuk melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia dan juga untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri. Lebih lanjut, penandatanganan Perjanjian Kerjasama Alih Alutsista dan Teknologi juga diartikan sebagai mulainya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.³

Berdasarkan pertemuan 2+2 sebagai keberlanjutan dari Nota Kerja Sama antara Indonesia dan Jepang pada tahun 2015 lalu, memiliki dua pengaruh bagi kedua negara. *Pertama*, pertemuan kedua negara dalam bingkai *workshop* yang diwakili oleh *Japan Self-Defense Forces* (JSDF) dan Kementerian Pertahanan Jepang dengan badan-badan terkait permasalahan keamanan dan pertahanan dari Republik Indonesia berpotensi untuk meningkatkan kesadaran mengenai kawasan maritim dan hukum internasional. *Kedua*, konsekuensi dari pertemuan 2+2 sebagai pertemuan yang meresmikan kerjasama kedua negara pada bidang militer dan pertahanan akan memiliki serangkaian langkah-langkah praksis, seperti pertukaran pelajar antar perwira, latihan gabungan bersama, dan bahkan sampai alih teknologi

¹ Helen Milner, "The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique," *Review of International Studies* 17, no. 1 (1991): 67–85.

² Caroline Bechtel, "Warriors, Scholars, Diplomats: The Role of Military Officers in Foreign

Policymaking," *Center for Strategic and International Studies* Fall, no. 14 (2017): 3–10.

³ Ditjen Strategi Pertahanan RI, "Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Dan Pertahanan Indonesia – Jepang," *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.

yang mampu menjadi faktor-faktor untuk meningkatkan pembangunan kapasitas (*capacity building*) kedua negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan sumber daya (pertahanan) kedua negara agar mampu menghalau ancaman bagi keamanan negara masing-masing.⁴

Selain alih teknologi, Indonesia dan Jepang dilaporkan telah menyepakati kerjasama untuk pembangunan kapal perang maritim. Kapal perang tersebut didesain oleh *Japan Ministry of Self-Defense Force (Japan MSDF)* dalam bentuk perenkayasaan model kapal Frigate.⁵

KERANGKA TEORI Perspektif Neorealisme

Bagi Neorealisme diprakarsai oleh Kenneth Waltz memandang bahwa fenomena yang konfliktual seperti perang justru bukan disebabkan oleh sifat alamiah manusia semata, tetapi lebih kepada struktur. Dalam hal ini, struktur yang dimaksud oleh Waltz adalah kondisi anarkis yang hadir dalam kontestasi perpolitik internasional. Kondisi ini menyebabkan negara-negara bertindak secara agresif.⁶

Lebih spesifik, Waltz meneruskan penjelasannya bahwa dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan upaya negara untuk meningkatkan kapabilitasnya adalah upaya negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam lanskap *Defensive Realism*. Dalam hal ini, negara tidak berupaya untuk mengejar akumulasi kekuatan secara masif dan terbatas pada upaya untuk *survival* yang ditujukan untuk menciptakan keadaan agar negara-negara

berada pada kondisi *Balance of Power* (BOP).

Lebih spesifik, Waltz meneruskan penjelasannya bahwa dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan upaya negara untuk meningkatkan kapabilitasnya adalah upaya negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam lanskap *Defensive Realism*. Dalam hal ini, negara tidak berupaya untuk mengejar akumulasi kekuatan secara masif dan terbatas pada upaya untuk *survival* yang ditujukan untuk menciptakan keadaan agar negara-negara berada pada kondisi *Balance of Power* (BOP).

Dalam konteks penelitian ini, misalnya, upaya Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bidang pertahanan dan keamanan serta inovasi militer akan muncul (dalam upaya BOP) jika:⁷

1. Sebuah negara merasa akan mendapatkan ancaman.
2. Sebuah ingin mengubah sikap politik-pertahanannya menjadi kekuatan yang revisionis.
3. Sebuah negara memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan lingkup regional atau global.

Teori Diplomasi Pertahanan

Praktik diplomasi yang berfokus pada kerjasama militer disebut Diplomasi Pertahanan dan merupakan salah satu varian dari diplomasi yang kemudian digunakan negara untuk tujuan-tujuan tertentu. Secara konseptual, Diplomasi Pertahanan hadir sebagai jawaban untuk negara sebagai orotitas politik yang memiliki hak koersif (militer) dan sadar akan keterbatasan bahwa militer tidak dapat menjawab seluruh persoalan kenegaraan

⁴ Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar, "Indonesia-Japan Advancing Defense and Security Cooperation: Promoting Democracy in Indo-Pacific Waters," *The Habibie Centre Insights* July 2021, no. 28 (2021): 1–5, www.habibiecenter.or.id.

⁵ The Sankei Shimbun, "Japan Offers to Jointly Build Warship with Indonesia," *Japan Forward*.

⁶ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics, Addison-Wesley Series in Political Science* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).

⁷ Joao Resende-Santos, *Neorealism, States, and the Modern Mass Army*, Cambridge University Press (New York: Cambridge University Press, 2007).

dalam kancah internasional. Secara umum, Diplomasi Pertahanan digunakan untuk mengintegrasikan seluruh *soft power* dengan dasar mekanisme *hard power* yang bertujuan untuk mendominasi.⁸

Terdapat beberapa poin yang menguraikan bentuk-bentuk dari Diplomasi Pertahanan. Poin-poin ini kemudian dijadikan rujukan atau *guidelines* dalam melihat fenomena antarnegara yang menggunakan instrumen militernya dengan angkatan bersenjata negara lain dengan pendekatan-pendekatan perdamaian dan kerjasama. Lebih lanjut, poin-poin ini merupakan bentuk aktivitas dari Diplomasi Pertahanan.⁹

- Hubungan bilateral dan multilateral dengan perwira atau aparatur sipil bidang pertahanan dengan negara lain.
- Melakukan pertemuan dengan atase pertahanan dengan negara lain.
- Perjanjian kerjasama pertahanan secara bilateral dengan negara lain.
- Melakukan pelatihan dengan aparatur sipil negara bidang pertahanan dan latihan gabungan bersama dengan negara lain.
- Penyediaan keahlian dan serangkaian rekomendasi mengenai kontrol demokratis atas angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan beberapa area teknis kemiliteran.
- Mengintensifkan hubungan dan melakukan pertukaran (untuk pelatihan atau pendidikan atau urusan pertahanan lainnya) antara personel militer dan bahkan unit

militer. Selain itu, juga melakukan kunjungan kapal (*ship visits*).

- Melakukan pertukaran dalam bentuk penempatan dari personel militer atau sipil dalam bidang pertahanan dengan negara sahabat dalam lingkup Kementerian (Pertahanan) dan bahkan penempatan pada bagian-bagian organisasi angkatan bersenjata.
- Pengerahan unit-unit (tempur) untuk latihan gabungan bersama.
- Melakukan hubungan bilateral dan multilateral dalam bentuk latihan gabungan bersama untuk kepentingan latihan militer.

Berdasarkan penjelasan Winger, serangkaian aktivitas Diplomasi Pertahanan seperti kunjungan militer, latihan gabungan bersama, pertukaran perwira, kunjungan kapal militer masih tidak dapat dikatakan sekadar penggunaan instrumen militer untuk tujuan damai, melainkan sebuah usaha langsung untuk menunjukkan preferensi dari kebijakan pertahanan suatu negara, pandangan, dan *worldview* yang lebih ditujukan untuk memperkuat kemitraan berdasarkan kepentingan (pertahanan) suatu negara ke negara lainnya. Dengan demikian berdasarkan penjelasan Winger Diplomasi Pertahanan merupakan penggunaan institusi pertahanan suatu negara secara damai untuk mengkooptasi institusi pemerintah negara lain untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Lebih lanjut, dalam

⁸ Gregory Winger, "The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy," in *IWM Junior Visiting Fellows' Conference Proceeding*, vol. XXXIII (Vienna: IWM, 2014), 13, <http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/the-velvet-gauntlet/>.

⁹ Andrew Cottey and Anthony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military*

Cooperation and Assistance, ed. Tim Huxley, The Adelphi, vol. The Adelphi (New York: The International Institute for Strategic Studies, 2004).

¹⁰ Winger, "The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy."

proses observasi untuk mendapatkan bangunan empiris yang kuat, penelitian ini memiliki beberapa objek penelitian untuk dilakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa ahli dan dari beberapa institusi. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memiliki dua metode. *Pertama*, wawancara langsung dengan ahli yang saat ini diproyeksikan ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. *Kedua*, penelitian ini didukung oleh *library research* untuk melakukan korelasi, verifikasi, dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pendekatan Tiongkok

Dalam upaya untuk beradaptasi dengan keadaan strategis global pada saat ini, Jepang menjalin beberapa kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi kawasan, seperti ASEAN. Kemitraan antara Jepang dan ASEAN sudah berlangsung lebih selama tiga puluh tahun. Jepang memandang ASEAN sebagai mitra strategis untuk mengintegrasikan konektivitas.¹¹

Dalam upaya menjaga konektivitas tersebut, Jepang juga melakukan kerjasama dengan Indonesia. Dalam rentang waktu 2015 sampai 2021, Jepang dan Indonesia telah melakukan banyak kerjasama yang terdokumentasi pada berbagai perjanjian dan MoU.

Terdapat berbagai rangkaian kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang dalam aspek pertahanan, seperti dialog antar militer, kunjungan kapal perang, pertukaran informasi, penyamaan persepsi ancaman di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, dll. Untuk memberikan uraian penjelasan, maka penjabaran hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia diberikan limitasi tahun dalam rentang waktu 2015 sampai 2021. Berbagai

kerjasama dan hubungan antara Jepang dan Indonesia dalam konteks pertahanan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

1. Hukum Aviasi Internasional Jepang-Indonesia, 2015.¹²

Pada poin ini, hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia berbentuk pertukaran informasi (*information sharing*) dengan menghadirkan delegasi dari Kementerian Pertahanan Jepang dan dua personel *Japan Self Defense Force* ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Jakarta. Tujuan Jepang dalam agenda ini, selain melakukan *information sharing*, Jepang juga menyampaikan berbagai perjanjian mengenai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran dan kecelakaan aviasi antara Jepang dan negara-negara sekitarnya.

2. Hubungan antara Jepang-Indonesia Bidang Oceanografi, 2016.¹³

Pada agenda ini, Jepang dan Indonesia membahas tema kelautan atau oceanografi dengan menghadirkan beberapa pakar dari kedua negara. Pembahasan mengenai kelautan tersebut secara spesifik juga membahas tentang *trajectory prediction* dengan bingkai keamanan dan pengelolaan bencana kelautan—seperti Tsunami. Inti dari agenda tersebut adalah bagaimana perangkat-perangkat keamanan-pertahanan dari Indonesia dan Jepang dapat berkolaborasi dengan berbagai perangkat lain dari sebuah negara. Lebih lanjut, agenda tersebut juga dihadiri oleh pihak Kementerian Pertahanan dari Indonesia dan Jepang, perwira dari Indonesia dan Jepang, baik tentara atau pihak

¹¹ MOFA Japan, “Japan-ASEAN Cooperation,” *Ministry of Foreign Affairs of Japan*.

¹² Japan Ministry of Defense, *International Aviation Law* (Jakarta, 2015).

¹³ Japan Ministry of Defense, *Oceanography* (Jakarta, 2016).

Keamanan Laut (*Coast Guard*) dan berlokasi di Markas Besar TNI Angkatan Laut Indonesia.

3. Hubungan Jepang-Indonesia bidang Oceanografi, 2017.¹⁴

Rentang satu tahun setelah melakukan jajak pendapat tentang keselamatan dan keamanan laut, Kementerian Pertahanan Jepang mengadakan pertemuan dengan mengundang delegasi Indonesia untuk melakukan pembahasan yang sama di Markas Besar *Japan Self Defense Force* Angkatan Laut di Yokosuka, tepatnya di Departemen Keamanan Laut Jepang. Hubungan kedua negara dalam agenda ini juga melakukan pelatihan bersama dengan mengadakan simulasi bencana Tsunami.

4. Hubungan Pertahanan Indonesia dan Jepang dalam Bidang Hukum Laut Internasional, 2017.¹⁵

Agenda hubungan antara Jepang dan Indonesia pada poin ini berbicara mengenai Hukum Laut Internasional yang berlokasi di Jakarta. Selain mengenai pemberian seminar, Kementerian Pertahanan Jepang juga melakukan pertukaran informasi dengan pihak Indonesia mengenai operasi kontra-pembajakan, pertukaran informasi mengenai personel dan kapabilitas personel tentara Indonesia yang bertujuan untuk memiliki pemahaman bersama mengenai hukum maritim internasional dan supremasi hukum laut bagi kedua negara.

5. Hubungan Pertahanan Jepang dan Indonesia Mengenai Hukum Laut Internasional, 2018.¹⁶

Agenda ini memiliki persamaan dengan agenda mengenai hukum laut internasional pada satu tahun sebelumnya. Akan tetapi, hasil dari pertemuan Jepang dan Indonesia pada agenda ini merujuk pada pemahaman mendalam mengenai hukum laut internasional bagi kedua negara. Agenda ini berlokasi di Jakarta dengan menghadirkan perwira kedua negara, anggota Kementerian Pertahanan Jepang dan Indonesia, dan anggota pemerintahan.

6. ASEAN Defense Ministerial Meetings Plus, Partisipasi Jepang terhadap Keamanan Regional ASEAN, 2019.

Meski pun agenda ini berlokasi di Thailand, tetapi juga berkolaborasi dengan Indonesia, setidaknya pada ASEAN-Japan Bilateral, Trilateral, dan Informal Meeting. Selain itu, pada pertemuan ADMM+ tersebut, hasil pertemuan menghasilkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang berdasarkan dua kesepakatan.¹⁷

Pertama, Menteri Pertahanan Jepang—Taro Kono—melakukan pengajuan kerjasama dengan Indonesia. Bentuk kerjasama tersebut adalah perbaruan sistem jaringan komunikasi untuk kapal dan pesawat, dan partisipasi *Japan Self Defense Force* dalam *multi-naval exercise* dengan Indonesia di bawah Latihan Gabungan Bersama KOMODO. *Kedua*, kedua Menteri Pertahanan—Taro Kono dan Prabowo Subianto—menyepakati untuk melakukan kerjasama lanjutan bidang pertahanan. Lebih

¹⁴ Japan Ministry of Defense, *Oceanography* (Yokosuka, 2017).

¹⁵ Japan Ministry of Defense, *International Law of the Sea* (Jakarta, 2017).

¹⁶ Japan Ministry of Defense, *International Law of the Sea* (Jakarta, 2018).

¹⁷ Japan Ministry of Defense, "Defense Minister Kono's Participation in the 6th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus, the 5th ASEAN-Japan Defence Ministers' Informal Meeting, and Bilateral and Trilateral Defense Ministerial Meetings," *Japan Ministry of Defense*.

lanjut, Jepang juga menyinggung potensi ancaman di kawasan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara (*South China Sea*) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.¹⁸

7. Hubungan Jepang dan Indonesia Tentang Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Bencana (HA/DR / *Humanitarian Assistance and Disaster Relief*), 2019.¹⁹

Agenda bilateral ini melibatkan setidaknya 100 perwira TNI aktif dan beberapa prajurit dari *Japan Self Defense Force*. Pada agenda yang berfokus mengenai keterlibatan tentara dalam cakupan-cakupan kemanusiaan dan kebencanaan ini, agenda yang diselenggarakan di Jakarta ini juga menjadi peristiwa dimulainya hubungan kerjasama pertahanan antara TNI dan JSDF khusus untuk manajemen bencana.

8. Hubungan Jepang dan Indonesia Tentang Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Bencana (HA/DR / *Humanitarian Assistance and Disaster Relief*), 2020.²⁰

Satu tahun setelah melakukan peninjauan pendapat agar dapat memiliki kesepahaman bersama mengenai kontribusi perangkat pertahanan antara JSDF dan TNI, Kementerian Pertahanan Jepang mengundang delapan prajurit TNI untuk melakukan pertukaran informasi ke markas besar Angkatan Udara *Japan Self Defense Force* dan juga untuk melakukan observasi pada latihan gabungan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat mengenai

bantuan kemanusiaan dan pengelolaan bencana. Hasil pertemuan ini adalah memperkuat pemahaman TNI mengenai kontribusi *Japan Self Defense Force* dalam pengelolaan bencana.

9. Komunikasi Intensif Bilateral Indonesia dan Jepang—Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang, 2020.²¹

Konferensi bilateral pada tahun 2020 dilakukan secara virtual dengan pembahasan utama mengenai penanganan pandemi Covid-19, isu geopolitik kawasan seperti Laut Natuna Utara (*South China Sea*), dan memperkuat hubungan kerjasama pertahanan antara Jepang dan Indonesia agar dapat merelasikan antara ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* yang diajukan oleh ASEAN pada tahun 2019 yang lalu dengan konsep yang diajukan Jepang berupa *Free and Open Indo-Pacific*. Lebih lanjut, hasil pertemuan virtual tersebut menghasilkan tiga kesepakatan yang diwakili oleh Menteri Pertahanan kedua negara.

Pertama, kedua negara menyepakati untuk melakukan pertukaran informasi yang intensif mengenai persebaran Covid-19 dengan menggunakan perangkat pertahanan sebagai bentuk deteksi dini persebaran Covid-19 untuk tahap awal. *Kedua*, pertukaran informasi mengenai persepsi ancaman oleh pandemi dan dampak Covid-19 bagi kebijakan pertahanan masing-masing kedua negara. *Ketiga*, mempercepat kerjasama pertahanan “2+2” yang lebih solid yang bertujuan untuk memperkuat dan menegakkan

¹⁸ Japan Ministry of Defense, “Japan-Indonesia Defense Ministerial Meeting (Summary),” *Japan Ministry of Defense*.

¹⁹ Japan Ministry of Defense, *HA/DR Dispatch* (Jakarta, 2019).

²⁰ Japan Ministry of Defense, *HA/DR Invitation* (Komaki, 2020).

²¹ Japan Ministry of Defense, *Japan-Indonesia Defense Minister’s Telephone Conversation* (Jakarta & Tokyo, n.d.).

wacana *Free and Open Indo-Pacific* yang secara simultan terus menjaga komunikasi yang intensif antara pihak pertahanan dari kedua negara.

10. Pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia—Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Jepang—Nobuo Kishi, 2021.²²

Pertemuan kedua Menteri Pertahanan dari Indonesia dan Jepang pada tahun 2021 tersebut merupakan agenda keberlanjutan dari hubungan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya. Pada pertemuan Menteri itu, Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi, menjelaskan kekhawatirannya mengenai kapasitas hukum dari *China Coast Guard* yang dinilai semakin ofensif dari waktu ke waktu. Selain itu, kedua Menteri Pertahanan tersebut juga membahas mengenai kebebasan bernavigasi dan aviasi yang perlu didasari oleh kaidah hukum internasional, termasuk UNCLOS. Pembahasan-pembahasan regional pun menjadi topik perbincangan, terlebih di kawasan ASEAN, seperti Myanmar.

Selain pembahasan-pembahasan mengenai isu geopolitik di kawasan, baik Asia Timur dan Asia Tenggara, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai tindak lanjutan dari peninjauan pendapat dan penguatan hubungan, terkhusus pada konteks pertahanan. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan tersebut adalah:

- Merealisasikan kunjungan Panglima TNI ke Jepang.

- Memperkuat hubungan pertahanan dalam bentuk M-to-M atau *Military to Military Dialogue*.
- Melanjutkan pembahasan dan konsultasi mengenai pengadaan alat pertahanan dan teknologi pertahanan yang bertujuan untuk melakukan pengembangan pada proyek-proyek pertahanan yang lebih spesifik ke depannya.
- Memperkuat komunikasi antara TNI dan JSDF dalam kerangka *port calls* untuk kapal dan pesawat.
- Melakukan latihan gabungan bersama (latgabma) antara Indonesia dan Jepang.
- Memperkuat kerjasama dalam agenda pertahanan yang secara spesifik mengenai bantuan kemanusiaan dan manajemen bencana.
- Memperkuat hubungan bilateral dalam agenda pertahanan untuk mendukung wacana *Free and Open Indo-Pacific* yang ditujukan untuk memperkuat agenda

²² Japan Ministry of Defense, *Japan-Indonesia Defense Ministers' Meeting* (Tokyo, 2021).

ASEAN dalam ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

Selebihnya, pertemuan tersebut mendorong hubungan pertahanan bilateral yang lebih rinci dan kuat.

11. Pertemuan 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Jepang, 2021.²³

Sebagai salah satu agenda yang progresif dalam hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam lima tahun terakhir, agenda ini merupakan keberlanjutan dari nota kesepahaman 2+2 pada tahun 2015 yang lalu. Dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri kedua negara ini, Jepang mempromosikan pandangan politik luar negerinya melalui *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang terdiri dari tiga dasar rasionalisasi. *Pertama*, penyebaran (*dissemination*) dan penetapan (*establishment*) mengenai hal-hal dasar dalam interaksi internasional, seperti perdagangan bebas, HAM, dan aturan hukum. *Kedua*, kemakmuran ekonomi (*prosperity*) yang dapat dicapai melalui penguatan konektivitas. *Ketiga*, sebagai bentuk upaya mengenai stabilitas keamanan, perdamaian, dan keamanan maritim. Lebih lanjut, Jepang menekankan perlunya kerjasama yang mendalam untuk mendukung agenda FOIP dan ASEAN Outlook in Indo-Pacific (AOIP) yang pada dasarnya

memiliki korelasi yang substantif. Sebagai respon, Indonesia menyepakati usulan perwakilan Jepang tersebut.

12. Kunjungan Kapal (*Port Calls*) Japan Maritime Self Defense Force ke Jakarta, 2021.²⁴

Sebagai salah satu bentuk persahabatan negara dalam aspek pertahanan, JMSDF melakukan kunjungan ke Jakarta menggunakan kapal perang JS Akebono. Selain kunjungan persahabatan, kunjungan kapal perang Jepang tersebut juga sebagai bentuk keseriusan Jepang dalam mendukung agenda *Free and Open Indo-Pacific* untuk ASEAN Outlook in Indo-Pacific.

Kekhawatiran Jepang kepada Tiongkok diarahkan pada agresivitas Tiongkok melalui *China Coast Guard* yang selalu berlayar memasuki area domestik Jepang di Pulau Senkaku, sementara kekhawatiran yang sama juga hadir di kawasan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.

faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama pertahanan 2+2 antara Jepang dan Indonesia, yaitu faktor eksternal yang dikategorikan sebagai isu-isu strategis yang memberikan pengaruh kebijakan politik luar negeri pada kawasan lain, tepatnya Asia Timur yang menitikberatkan pada kepentingan Jepang sendiri. Lalu, terdapat pula faktor intra-kawasan, yaitu kondisi kawasan sekitar Indonesia dengan negara-negara tetangganya atau aktor rasional lainnya yang memberikan pengaruh untuk mendorong perjanjian 2+2, seperti agresivitas Tiongkok di Laut Natuna Utara. *Kedua*, faktor dinamika lingkungan strategis yang melintasi berbagai kawasan

²³ Japan Ministry of Defense, *Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial Meeting ("2+2")* (Tokyo, 2021).

²⁴ Japan Ministry of Defense, *JS Akebono of JMSDF Made a Port Call at Jakarta, Indonesia* (Jakarta,

2021), <https://www.mod.go.jp/en/article/2021/04/643b5e0e9e1a263f9994f4666dfc5b9115406f83.html>.

yang dikontekstualisasikan kepada Indonesia. Secara spesifik, faktor ini berupa perimbangan kekuatan dan aliansi yang memiliki potensi ancaman kepada Indonesia dan memiliki potensi pula untuk terjadinya hubungan kemitraan strategis, seperti aliansi AUKUS/Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, *Five Power Defense Agreement*, *Free and Open Indo-Pacific* dan *ASEAN Outlook Indo-Pacific*.

Dalam rentang tahun 2015 sampai 2021, hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang lingkup 2+2 telah terjadi banyak peningkatan yang signifikan. Lebih lanjut, dalam rentang waktu tersebut, setidaknya terdapat empat ruang lingkup progres kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang; dialog konsultasi antara lembaga pertahanan dan keamanan Indonesia dan Jepang, kerjasama peningkatan *capacity building*, pertukaran informasi tentang institusi dan beberapa isu pertahanan, dan kerjasama pelatihan militer melalui pertukaran pelajar (perwira). Berdasarkan empat ruang lingkup tersebut, dapat diuraikan seperti di bawah ini.²⁵

1. Peningkatan hubungan dan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dan *Japan Self Defense Force*.
2. Peningkatan dialog antar instrumen pertahanan negara Indonesia dan Jepang.
3. Kerjasama pendidikan perwira melalui pertukaran pelajar Indonesia dan Jepang. Dalam hal ini, dalam rentang waktu 1967 sampai 2022, telah terjadi pertukaran siswa Sekolah Staf Komando (SESKO) TNI ke Jepang sebanyak 168 siswa secara luas dari matra darat, laut, dan udara.
4. Pengiriman delegasi tentara Jepang untuk berlatih di Indonesia, di kawasan *International Peace and*

Security Center Sentul, dalam program UN *Tringular Partnership Project* (UNTPP).

5. Pengajuan alih teknologi kapal perang jenis Frigate kelas Mizuno/Mogami yang sedang dalam proses penanganan oleh divisi ATLA (*Acquisition Technology and Logistic Agency*) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait permasalahan regulasi dan perundang-undangan.

Dalam konteks 2+2, Indonesia dan Jepang memiliki kemiripan ancaman pada kawasan masing-masing. Tingkat dan ancaman tersebut dapat berupa *high-politics* seperti agitasi militer negara lain dan ancaman non-tradisional yang menggabungkan aspek militer dan sipil.

Serangkaian perubahan militer yang dilakukan akan memiliki korelasi dengan ancaman luar negeri yang dialami suatu negara. Lebih lanjut, bentuk perubahan militer dalam memperkuat kapabilitas militernya dapat pula berupa dengan menjalin hubungan kooperatif secara bilateral atau pun multilateral sehingga dapat memunculkan kerjasama lanjutan. Dalam konteks antara Indonesia dan Jepang pada perjanjian kerjasama pertahanan 2+2, relevansinya terletak pada kerjasama pertahanan, bukan pembentukan aliansi. Hal tersebut dikarenakan kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) lebih menekankan pada pembentukan kerangka internasional yang ditujukan untuk kerjasama pertahanan yang rutin atau berkelanjutan.²⁶

Selain ancaman luar negeri, faktor lain yang mendorong

²⁵ Rizqa Deni Fathanah, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Kementerian Pertahanan* (Jakarta, 2022).

²⁶ Brandon J. Kinne, "The Defense Cooperation Agreement Dataset (DCAD)," *Journal of Conflict Resolution* 64, no. 4 (2020): 729–755.

perubahan militer yang kemudian memberikan implikasi pada kebijakan pertahanan adalah teknologi persenjataan. Hal tersebut dikarenakan teknologi persenjataan memberikan pengaruh berdasarkan beberapa aspek, seperti kemajuan teknologi pertahanan bagi negara lain akan memancing negara lain untuk waspada, kadaluarsanya teknologi pertahanan suatu negara, dan teknologi pertahanan terbaru yang dimiliki oleh mitra strategis sehingga memberikan konsekuensi suatu negara untuk mengejar interoperabilitas (kemampuan militer).²⁷ Oleh karena itu, ancaman luar negeri tidak dapat menjadi satu-satunya faktor yang mendorong perubahan militer suatu negara. Pada konteks Indonesia dalam perjanjian 2+2, terdapat beberapa poin kerjasama yang menekankan pada pengadaan alat pertahanan dan alih teknologi dari Jepang.

KESIMPULAN

Hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang tidak hanya direpresentasikan pada hubungan bilateral dalam lingkup ekonomi saja. Pada dasarnya, kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang memang didasari oleh aspek ekonomi internasional, tetapi kedua negara tersebut memperkuat kemitraan strategis mereka melalui bingkai Diplomasi Pertahanan. Dalam mengimplementasikan sikap politik luar negeri antara Indonesia dan Jepang, kedua negara menandatangani Nota Kerja Sama 2+2 pada tahun 2015.

Kerjasama 2+2 merupakan *platform* antara Indonesia dan Jepang untuk mempererat kemitraan strategis pada aspek pertahanan. Lebih lanjut, kerjasama pertahanan 2+2 tersebut menekankan pada

pembahasan-pembahasan bidang militer dan pertahanan secara umum. Perjanjian tersebut diwakili oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri kedua negara. Dikarenakan sifat kedua perjanjian ini memiliki orientasi pada bidang pertahanan, maka perjanjian kerjasama pertahanan 2+2 ini memberikan proyeksi pada alih teknologi alutsista. Bagi Indonesia, alih teknologi tersebut memiliki potensi strategis untuk melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan juga untuk menjadi rasionalisasi modernisasi pada ekosistem industri pertahanan dalam negeri.

Hubungan kemitraan strategis bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang mengalami peningkatan yang bermula pada tahun 2015. Momentum kenaikan hubungan strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kerja Sama 2+2 pada 2015 yang kemudian diisi oleh kegiatan pertahanan bilateral kedua negara. Nota Kerja Sama 2+2 antara Indonesia dan Jepang tersebut berlanjut dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama bidang pertahanan 2+2 pada tahun 2021. Pada rentang tahun 2015 sampai 2021, hubungan militer kedua negara diisi oleh berbagai aktivitas yang direfleksikan sebagai Diplomasi Pertahanan.

Serangkaian aktivitas kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang yang terjadi rentang tahun 2015 sampai 2021 tersebut berada pada multidimensi yang memiliki korelasi dengan bidang pertahanan. Di antaranya adalah alur dan sistem aviasi, oceanografi, alur perdagangan internasional berupa rantai pasok, isu-isu strategis masing-masing regional, taktik militer untuk bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, hingga pertukaran informasi mengenai ancaman, baik laten atau aktual. Dalam implementasinya, terjadi banyak pertemuan dan konferensi yang melibatkan perangkat

²⁷ Stephen Peter Rosen, "New Ways of War: Understanding Military Innovation," *International Security* 13, no. 1 (1988): 134–168.

pertahanan negara masing-masing; Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia dan Jepang mendelegasikan *Japan Self-Defense Force* sebagai *leading sector*.

Sehingga, berdasarkan pengumpulan data dan melalui proses analisis, penelitian ini mendapatkan beberapa temuan, yaitu kemiripan tantangan pada dinamika lingkungan strategis antara Jepang dan Indonesia. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik dalam Diplomasi Pertahanan yang dilakukan pada bingkai 2+2; Indonesia menganggap hubungan kemitraan strategis dengan Jepang mampu berkontribusi pada peningkatan kapabilitas pertahanan—terkhususkan militer—dan Jepang menjadikan Indonesia mitra perdagangan pada aspek pertahanan.

Kemiripan tantangan pada permasalahan kawasan menjadi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penandatanganan 2+2. Pada kawasan Asia Timur, Jepang berada pada pusaran tantangan. Terdapat Tiongkok dengan berbagai agitasi militer di kawasan, baik kepada Jepang dan Taiwan. Pada 20 tahun terakhir, Tiongkok mampu memperbaiki ekosistem industri pertahanannya dan melakukan reorganisasi angkatan bersenjata (*People's Liberation Army*). Dikarenakan faktor peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dengan pengeluaran anggaran pertahanan yang paling besar dan dominan untuk kawasan seluruh Asia, lalu diisi pula dengan sengketa kepemilikan pulau Senkaku, Tiongkok diasumsikan sebagai potensi ancaman bagi Jepang yang secara hubungan diplomasi dan militer lebih mengedepankan sikap politik luar negeri Amerika Serikat.

Selain itu, pada kawasan yang sama, terdapat pula Korea Utara yang melakukan agitasi militer menggunakan rudal dengan varian yang beragam. Dalam 3 tahun terakhir, Korea Utara melakukan modifikasi militer yang memiliki rudal dengan kapasitas yang sama dengan Rusia dan jarak tempuh dan ketinggian yang kian

meningkat. Dalam perspektif Jepang, Tiongkok yang memiliki kecenderungan aliansi politik luar negeri dengan Tiongkok juga dijadikan potensi ancaman.

Temuan penelitian ini juga hadir di kawasan Asia Tenggara dengan dinamika lingkungan strategis. Indonesia, sebagaimana Jepang, berada pada pusaran ancaman yang sama. Akan tetapi, Indonesia memiliki kekhususan pada isu kawasannya, yaitu tensi kepemilikan wilayah di kawasan Laut Natuna Utara (*South China Sea*), bukan merupakan konflik militer, tetapi berupa kontestasi internasional karena menghadirkan berbagai aktor di dalamnya. Selain itu, terdapat pula *Five Powers Defence Agreement* yang menegaskan Indonesia dan AUKUS sebagai aliansi negara-negara yang memiliki pengaruh kuat untuk tingkat kawasan dan global.

Pada *Five Powers Defence Agreement*, secara historis memang dibentuk untuk merespon Indonesia sebagai *New Emerging Power* pada masa Soekarno. Aliansi pertahanan tersebut berisikan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Secara geostrategis, Indonesia terkepung oleh Keamanan Kolektif yang masih berjalan hingga kini. Indonesia memberikan respon dengan memperkuat Diplomasi Pertahanan dengan masing-masing atau secara multilateral kepada negara-negara anggota *Five Powers Defence Agreement*.

Pada fenomena terakhir, terdapat pula AUKUS yang berada kategoris intra-kawasan. Hubungan pertahanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat ini memberikan pengaruh pada dinamika lingkungan strategis dalam perspektif Indonesia. Hubungan trilateral ini tidak hanya menitikberatkan pembangunan fasilitas nuklir dan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir di Indo-Pasifik, melainkan terjadinya penambahan gelar pasukan (*Military Deployment*) di Indo-Pasifik, tepatnya di Australia. Setidaknya terdapat 2.200 Marinir Amerika Serikat yang ditempatkan kawasan Darwin, 100 prajurit Marinir dan

100 Angkatan Darat Amerika Serikat di Palau.

Kemiripan tantangan tersebut berkorelasi pada perjanjian 2+2 antara Indonesia dan Jepang. Analisis penelitian ini mengarah pada upaya Indonesia melalui 2+2 untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Melalui pelaksanaan Diplomasi Pertahanan, Indonesia menerapkan prinsip Politik Bebas dan Aktif sebagai doktrin politik luar negeri dan *Defensive Active* yang terletak pada doktrin pertahanan Indonesia. Upaya peningkatan tersebut dapat dilihat pada empat poin strategis.

Pertama, Indonesia melanjutkan perjanjian kerjasamanya pertahanan 2+2 dengan Jepang melalui preteks atau alasan-alasan strategis. Dikarenakan upaya Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan, maka erat kaitannya dengan perubahan organisasi militer yang ingin dicapai Indonesia melalui aspek ancaman luar negeri, teknologi pertahanan, dan norma-norma internasional yang dilekatkan pada perangkat pertahanan atau militer suatu negara. Berdasarkan tiga aspek tersebut, Indonesia mendapatkan alasan strategis dan mengkorelasikannya pada bingkai 2+2 antara Indonesia dan Jepang.

Kedua, latihan gabungan militer bersama dan pertukaran pendidikan untuk prajurit kedua negara. Salah satu bentuk terjadinya Diplomasi Pertahanan adalah terjadinya latihan gabungan militer bersama dan pertukaran informasi antar prajurit secara formal atau taktis operasi. Indonesia menggelar *Garuda Shield 2022* yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk salah penguatan keterlibatan strategis dengan militer negara lain. Salah satu negara yang bergabung tersebut dan pertamakali adalah Jepang. Di saat bersamaan, terdapat sejumlah prajurit TNI yang melanjutkan pendidikan di Jepang sebanyak 27 orang rentang tahun 1967 sampai 2022. Sedangkan jumlah prajurit *Japan Self-Defense Force*, rentang waktu 1970 sampai 2022 sebanyak 9 orang.

Ketiga, kerjasama pertahanan-keamanan laut, pengadaan alat pertahanan, dan penjagaan kontrol demokratis. Dampak dari 2+2 tidak hanya berimbas pada TNI, melainkan pada institusi pertahanan-keamanan Indonesia lainnya, seperti BNPB pada kerjasama kemanusiaan dan tanggap bencana, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia. Selain itu, terjadi pula proyeksi alih teknologi dan pengadaan alat pertahanan pada delapan kapal Frigate antara Indonesia dan Jepang yang melalui proses kontrol demokratis.

Dengan demikian, dapat dilihat korelasi antara perjanjian kerjasama pertahanan 2+2 antara Indonesia dan Jepang memiliki urgensi yang relevan dan alasan-alasan strategis yang mendukung yang didasari berbagai kesamaan, kompleksitas keamanan, dan interoperabilitas militer. Sehingga, Diplomasi Pertahanan yang digunakan Indonesia memiliki korelasi untuk membangun dan memperkuat kapabilitas militer Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Caroline Bechtel, "Warriors, Scholars, Diplomats: The Role of Military Officers in Foreign Policymaking," *Center for Strategic and International Studies* Fall, no. 14 (2017): 3–10.
- Ditjen Strategi Pertahanan RI, "Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Dan Pertahanan Indonesia – Jepang," *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.
- Helen Milner, "The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique," *Review of International Studies* 17, no. 1 (1991): 67–85.
- Japan Ministry of Defense, *Japan-Indonesia Defense Ministers' Meeting* (Tokyo, 2021).
- Japan Ministry of Defense, *International Aviation Law* (Jakarta, 2015).
- Japan Ministry of Defense, *Oceanography* (Jakarta, 2016).

- Japan Ministry of Defense, *Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial Meeting* (“2+2”) (Tokyo, 2021).
- Japan Ministry of Defense, *JS Akebono of JMSDF Made a Port Call at Jakarta, Indonesia* (Jakarta, 2021), <https://www.mod.go.jp/en/article/2021/04/643b5e0e9e1a263f9994f4666dfc5b9115406f83.html>.
- Japan Ministry of Defense, “Japan-Indonesia Defense Ministerial Meeting (Summary),” *Japan Ministry of Defense*.
- Japan Ministry of Defense, *HA/DR Dispatch* (Jakarta, 2019).
- Japan Ministry of Defense, *HA/DR Invitation* (Komaki, 2020).
- Japan Ministry of Defense, *Japan-Indonesia Defense Minister’s Telephone Conversation* (Jakarta & Tokyo, n.d.).
- Joao Resende-Santos, *Neorealism, States, and the Modern Mass Army*, Cambridge University Press (New York: Cambridge University Press, 2007).
- Japan Ministry of Defense, *International Aviation Law* (Jakarta, 2015).
- Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, Addison-Wesley Series in Political Science (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).
- MOFA Japan, “Japan-ASEAN Cooperation,” *Ministry of Foreign Affairs of Japan*.
- Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar, “Indonesia-Japan Advancing Defense and Security Cooperation: Promoting Democracy in Indo-Pacific Waters,” *The Habibie Centre Insights* July 2021, no. 28 (2021): 1–5, www.habibiecenter.or.id.
- Rizqa Deni Fathanah, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Kementerian Pertahanan* (Jakarta, 2022).
- Stephen Peter Rosen, “New Ways of War: Understanding Military Innovation,” *International Security* 13, no. 1 (1988): 134–168.
- Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar, “Indonesia-Japan Advancing Defense and Security Cooperation: Promoting Democracy in Indo-Pacific Waters,” *The Habibie Centre Insights* July 2021, no. 28 (2021): 1–5, www.habibiecenter.or.id.
- The Sankei Shimbun, “Japan Offers to Jointly Build Warship with Indonesia,” *Japan Forward*.